

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Isu ketidaksetaraan gender di Indonesia tercermin dari rendahnya keterwakilan perempuan dalam struktur kelembagaan perwakilan, berdasarkan data Prakiraan Penduduk Indonesia 2010-2035, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2017 adalah 261,9 juta jiwa, dengan penduduk perempuan sebanyak 130,3 juta jiwa atau mewakili sekitar 9,75% dari jumlah penduduk. Sayangnya, banyak kelompok perempuan yang tidak terwakili oleh parlemen. Proporsi perempuan di kursi DPRD jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki¹,

Perwakilan perempuan di arena politik, seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), diasosiasikan dengan patriarki, yang berarti laki-laki memiliki hak khusus atas perempuan. Domain mereka tidak hanya mencakup area individu, tetapi area yang lebih luas seperti partisipasi politik, pendidikan, ekonomi, masyarakat, dan hukum. Secara historis, patriarki telah muncul di lembaga- lembaga sosial, hukum, politik, agama dan ekonomi dari berbagai budaya. Meskipun hal ini tidak secara eksplisit dinyatakan dalam Konstitusi atau undang-undang, pada kenyataannya

¹ Denni Peratama, “Kekosongan Keterwakilan Perempuan Dalam Formasi DPRD Kabupaten Pali Periode 2019-2024”. Skripsi Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (UIN Raden Fattah Palembang, 2020). hlm 2.

sebagian besar masyarakat modern masih bersifat patriarki²

Berdasarkan hasil Pemilu 2019, terjadi peningkatan keterwakilan perempuan di Lembaga Legislatif Nasional (DPR-RI) yang sebelumnya sebanyak 97 orang kini berada pada angka 20,8 persen atau 120 anggota legislatif perempuan dari 575 anggota DPR RI. Golkar sebagai partai dengan jumlah kursi terbanyak kedua berhasil menempatkan 19 orang kadernya ke DPR RI pada Pemilihan Legislatif 2019. Dari jumlah tersebut tujuh orang adalah incumbent dan 11 lainnya adalah pendatang baru³.

Ditingkat Provinsi Jambi, Jumlah anggota perempuan DPRD sebanyak tujuh orang, satu diantaranya berasal dari partai Golkar atas nama Dra. HJ. Maimaznah. Dalam konteks Kota Jambi, terjadi kekosongan keterwakilan perempuan pada fraksi Partai Golkar DPRD Kota Jambi, berdasarkan data pemilu Kota Jambi periode 2019- 2024 tidak ada satupun perempuan yang terpilih menjadi anggota DPRD di Kota Jambi. Berbeda pada periode 2014-2019, Golkar hanya mampu menempatkan satu orang kader perempuannya kedalam parlemen.

² *Ibid.* Hlm 3.

³ Media Indonesia, “Kader Perempuan Partai Golkar Raih 19 Kursi Di DPR RI,” <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/238207/>. Diakses Pada 18 Desember 2021 pukul 11.36 WIB.

Tabel 1. Daftar Anggota DPRD Kota Jambi fraksi Golkar 2019-2024⁴

No	Nama	Jumlah Suara	Dapil	Jenis kelamin
1.	Joni Ismed, SE	1.976	1	Laki-Laki
2.	Kemas Farid	3.199	3	Laki-Laki
3.	Saiful, S.H	1.758	4	Laki-Laki
4.	Muhili Amin	2.489	5	Laki-Laki

(Sumber : *Tribun Jambi*)

Tabel 2. Daftar Caleg Perempuan Partai Golkar 2019-2024⁵

No	Nama Caleg	Dapil
1.	Tuti Nuriawati, SE	1
2.	Roslaini	1
3.	Siti Sumartini, ST	2
4.	Dra. Tinza rifiana	2
5.	Tiurma Olivia Pardede	2
6.	Meivianur Sangda, S.Pd	3
7.	Lisnawati Siregar	3
8.	Habibah WA	3
9.	Eva Ramadhani, SE	4
10.	Eva Juliany, A.md	4
11.	Zaitun	4
12.	Gusmiwa Herlanda	4

⁴ (Sumber : *Tribun Jambi*)

⁵ (Sumber : *Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jambi*)

13.	Yuliantie, SE	5
14.	Syamsinar, SE	5
15.	Eli Ningsih, SH	5
16.	Ir Maimunah	5

(Sumber : Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jambi)

Penelitian yang sama sebelumnya dilakukan oleh Denni Pratama dengan tema “Kekosongan Keterwakilan Perempuan Dalam Formasi DPRD Kabupaten Pali Periode 2019-2024”. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa terjadinya kekosongan keterwakilan perempuan tersebut bukan semata-mata kurangnya sikap partai yang telah menerapkan Undang-Undang mengenai 30% peluang keterwakilan perempuan dalam legislatif, akan tetapi dikarenakan sebab dan akibat masih kurangnya representasi dari para kader perempuan yang meluas dari beberapa sebab-akibat tersebut. Di antaranya yakni, kurangnya partisipasi sosial, ekonomi, latar belakang pendidikan, peran media sosial, pengalaman organisasi politik perempuan, serta sistem patriarki.

Penelitian yang sama selanjutnya diteliti oleh Isnaini Rodiyah dengan tema “Keterwakilan Perempuan pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”. Hasil penelitian menunjukkan masih minimnya (belum memenuhi kuota) keterwakilan perempuan sebagai anggota DPRD di Kabupaten Sidoarjo yang disebabkan oleh keterbatasan akses membuat perempuan mengalami kesulitan untuk menunjukkan bahwa kepentingannya tidak terakomodir dalam sistem politik. Kedua Penelitian sebelumnya ini hanya

berbeda pada objek penelitian saja yang lebih luas, penelitian yang akan diteliti oleh peneliti saat ini mengambil objek penelitian yang sedikit kecil yakni partai Golkar.

Partisipasi politik perempuan partai Golkar Kota Jambi penulis anggap sudah cukup baik dilihat dari banyaknya caleg perempuan yang di usung. Pada pileg 2019 Kota Jambi, Sebanyak 16 orang caleg perempuan di usung oleh partai Golkar Kota Jambi dari jumlah keseluruhan 43 orang caleg, akan tetapi tak satupun caleg perempuan yang berhasil lolos. Kemudian yang menjadi alasan mengapa penulis mengambil partai Golkar sebagai objek penelitian dikarenakan partai Golkar termasuk partai yang besar di Indonesia, serta partai Golkar adalah partai politik dengan dana kampanye terbesar di pemilu 2019⁶, sedangkan caleg perempuan pada pemilu DPRD Kota Jambi tidak satupun yang berhasil lolos. Dalam hal ini peneliti merasa tertarik untuk menganalisis apa yang menjadi penyebab ketidak terpilihnya anggota caleg perempuan di partai Golkar ini dengan menggunakan teori partisipasi politik dan patriarki.

Berdasarkan fenomena tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai penyebab permasalahan tersebut dan upaya yang dilakukan Golkar kedepannya agar hal yang sama tidak terulang kembali. Dengan berbagai pertimbangan, maka peneliti memilih judul penelitian yaitu “Analisis Kekosongan Keterwakilan Perempuan Partai

⁶ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/05/03/5-partai-politik-dengan-dana-kampanye-terbesar-di-pemilu-2019> di akses pada 20 Maret 2022.

Golkar Pada DPRD Kota Jambi Periode 2019-2024”.

1.2 Perumusan Masalah

Melalui uraian diatas maka yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : Apa yang Menjadi Faktor Penyebab Kekosongan Keterwakilan Perempuan Partai Golkar Pada DPRD Kota Jambi Periode 2019-2024 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dirumuskan adalah sebagai berikut: Untuk Mengetahui Faktor Penyebab Kekosongan Keterwakilan Perempuan Partai Golkar Pada DPRD Kota Jambi Periode 2019-2024.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pembaca, baik yang bersifat teoritis maupun praktis. Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Untuk kepentingan teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap bidang akademis khususnya dalam hal konsepsi pada literatur Ilmu Politik, misalnya dalam menganalisis mengenai perempuan dan politik khususnya ranah pemilu legislatif.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan bacaan yang bermanfaat

untuk dapat memperkaya informasi mengenai dinamika partai politik baru dalam pemilu serta bahan evaluasi dan bahan pertimbangan bagi partai politik lain.

1.5 Landasan Teori

Teori yang digunakan sebagai pijakan penelitian adalah sebagai berikut :

1.5.1 Partisipasi Politik

Partisipasi menjadi salah satu prinsip mendasar dari good government, sehingga banyak kalangan menempatkan partisipasi sebagai strategi awal dalam mengawali reformasi 1998. Partisipasi berasal dari bahasa latin yaitu pars yang artinya bagian dan capere yang artinya mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara. Apabila digabungkan berarti “mengambil bagian”. Dalam bahasa inggris, partisipate atau participation berarti mengambil bagian atau peranan. Jadi partisipasi berarti mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik negara⁷ .

Partisipasi politik adalah salah satu aspek penting suatu demokrasi. Partisipasi politik merupakan ciri khas dari modernisasi politik. Adanya keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga negara, maka warga negara berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik. Oleh karena itu yang dimaksud dengan partisipasi politik menurut Huntington dan Nelson yang dikutip oleh Cholisin adalah kegiatan warga Negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah.

⁷ Suharno, B. (2004). *Bisnis Sambilan*. Elex Media Komputindo. Hlm 102-103

Selanjutnya Ramlan Surbakti sebagaimana yang dikutip oleh Cholisin memberikan definisi singkat mengenai partisipasi politik sebagai bentuk keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. Menurut Miriam Budiarjo, Cholisin menyatakan bahwa partisipasi politik secara umum dapat didefinisikan sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin Negara dan langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan publik (public policy). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (contacting) dengan pejabat pemerintah atau anggota perlemen, dan sebagainya. Oleh sebab itu, di negara-negara demokrasi pada umumnya dianggap bahwa partisipasi masyarakatnya lebih banyak, maka akan lebih baik. Dalam implementasinya tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa warga negara mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatankegiatan itu. Sebaliknya, tingkat partisipasi yang rendah pada umumnya dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karena dapat ditafsirkan bahwa banyak warga tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan. Ahli yang lain juga menyebutkan pengertian partisipasi politik:

1) Keith Fauls

Keith Fauls memberikan definisi partisipasi politik sebagai keterlibatan secara aktif (the active engagement) dari individu atau kelompok ke dalam

proses pemerintahan. Keterlibatan ini mencakup keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan maupun berlaku oposisi terhadap pemerintah.

2) Herbert McClosky dalam International Encyclopedia of the Social Sciences

Herbert McClosky memberikan definisi partisipasi politik sebagai kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.

3) Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson dalam No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries

Huntington dan Nelson partisipasi politik sebagai Kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud sebagai pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau secara damai atau kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif. Dari pendapat yang dikemukakan oleh para ahli di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi politik adalah hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan seseorang atau sekelompok orang dalam hal penentuan atau pengambilan kebijakan pemerintah baik itu dalam hal pemilihan pemimpin ataupun penentuan sikap terhadap kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah untuk di jalankan, yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung dengan cara konvensional ataupun dengan cara non konvensional atau bahkan dengan kekerasan (violence)

Dalam bukunya partisipasi dan partai politik, Miriam Budiarmo

mengartikan partisipasi politik sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy). Kegiatan ini mencakup pemberian suara lewat pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, Tingkat Analisis Partisipasi Politik mengadakan hubungan (contracting) dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen dan sebagainya⁸.

Dari pengertian ini maka, partisipasi dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh para aktifis perempuan pada hakekatnya adalah usaha menggali dan memberdayakan potensi-potensi yang dimiliki oleh perempuan. Secara umum partisipasi tidak hanya pada bidang politik akan tetapi dalam segala bidang kehidupan.

Perempuan mempunyai hak dan kewajibannya untuk ikut serta atau berpartisipasi aktif, hanya saja karena selama ini terjadi kesenjangan antara kaum laki-laki dan perempuan yang diakibatkan oleh produk-produk kebijakan yang bias gender. Sehingga dibutuhkan perjuangan keras dan keseluruhan dari segenap perempuan dalam segala ini, terlebih pada ranah politik, karena sangat berpengaruh terhadap produk kebijakan.

Lester menyebutkan adanya dua orientasi dalam partisipasi politik berhubungan dengan proses politik yaitu: partisipasi politik yang berhubungan pada output proses politik (disebut partisipasi pasif) dan pada input proses

⁸ Miriam Budiarjo, Partisipasi dan Partai Politik, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 1998), hlm. 9.

politik (disebut partisipasi aktif), dimana aktifitas individu atau kelompok yang berkenaan dengan masukan-masukan proses pembuatan kebijakan⁹.

Dalam partisipasi politik berlaku proses-proses politik yang harus dipahami dan diikuti, baik laki-laki ataupun perempuan. Yang dikatakan oleh David Easton, proses politik merupakan interaksi diantara lembaga - lembaga pemerintah dan kelompok-kelompok sosial. Hal ini menunjukkan, politik tidak hanya aktifitas yang ada pada tingkat elite tetapi melihat sudut pandang yang lebih pluralistic, yang menyertakan analisis pada aktifitas-aktifitas berbagai kelompok yang terorganisir diluar pemerintahan dengan memberikan penekanan pada individu-individu, kepentingan-kepentingan bersama dan nilai normatif. Sehingga berpartisipasi tidak sekedar ikut-ikutan tanpa tujuan dan arah yang jelas bagi setiap anggota, akan tetapi dalam proses partisipasi diharapkan keterlibatan bisa dilakukan secara aktif baik secara mental, emosi dan perilaku untuk memperoleh sesuatu yang diharapkan menjadi bagian yang terpenting.

Partisipasi politik perempuan saat ini semakin dibutuhkan dalam upaya pengintegrasian kebutuhan gender dalam berbagai kebijakan publik dan menggolongkan instrumen hukum yang sensitif gender yang selama ini terabaikan dan banyak menghambat kemajuan perempuan di berbagai sektor kehidupan. Dalam konteks negara, partisipasi politik rakyat adalah keterlibatan rakyat secara perseorangan (privat citizen) untuk mengerti, menyadari, mengkaji, melobi dan memprotes suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah

⁹ Lester, Political Participation, Sumber: <http://www.pelita.or.id>, diakses pada tanggal 22 Maret 2022, pukul 01.30 WIB

dengan tujuan mempengaruhi kebijakan agar aspiratif terhadap kepentingan mereka. Dari ilustrasi diatas, partisipasi rakyat bisa dipahami sebagai keterlibatan rakyat dalam pengertian politik secara sempit hubungan negara dan masyarakat (dalam bingkai governance) dan juga politik secara luas. Sedangkan politik secara luas yaitu semua bentuk keterlibatan masyarakat untuk mempengaruhi ataupun melakukan perubahan terhadap keputusan yang diambil. Partisipasi politik rakyat sebenarnya adalah tema sentral dari proses demokratisasi. Dalam kerangka inilah masyarakat bisa berperan aktif.

Adapun wujud partisipasi yang dapat dilakukan oleh perempuan mencakup :

1. Ikut serta menyalurkan hak suara dalam tahapan pemilihan umum baik secara langsung atau tidak langsung.
2. Menjalin hubungan (contacting) atau lobbying dengan pejabat pemerintah atau parlemen.
3. Menjadi anggota Partai Politik, organisasi masyarakat berbasis perempuan atau mengikuti kontestasi perpolitikan.

Hak-hak politik perempuan ditetapkan melalui instrumen hukum maupun dengan meratifikasi berbagai konvensi yang menjamin hak-hak politik tersebut. Undang – Undang RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 46 menyebutkan sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif dan yudikatif harus menjadi keterwakilan perempuan sesuai dengan persyaratan yang

ditentukan.

1) Faktor-faktor Partisipasi Politik

Partisipasi politik merupakan suatu aktivitas tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Ramlan Surbakti menyebutkan dua variable penting yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik seseorang. Pertama, aspek kesadaran politik terhadap pemerintah (sistem politik). Yang dimaksud dalam kesadaran politik adalah kesadaran hak dan kewajiban warga negara. Misalnya hak politik, hak ekonomi, hak perlindungan hukum, kewajiban ekonomi, kewajiban sosial dll. Kedua, menyangkut bagaimana penilaian serta apresiasi terhadap kebijakan pemerintah dan pelaksanaan pemerintahnya.

Selain itu ada faktor yang berdiri sendiri (bukan variable independen). Artinya bahwa rendah kedua faktor itu dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti status sosial, afiliasi politik orang tua, dan pengalaman berorganisasi. Yang dimaksud status sosial yaitu kedudukan seseorang berdasarkan keturunan, pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain.

Selanjutnya status ekonomi yaitu kedudukan seseorang dalam lapisan masyarakat, berdasarkan pemilikan kekayaan. Seseorang yang mempunyai status sosial dan ekonomi tinggi diperkirakan tidak hanya mempunyai pengetahuan politik, akan tetapi memiliki minat serta perhatian pada politik dan kepercayaan terhadap pemerintah¹⁰. Selanjutnya menurut Myron Weimer partisipasi politik di pengaruhi oleh beberapa hal, seperti yang dikutip oleh

¹⁰ Surbakti, A. R. (2006). Pranata Politik” dalam J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto. *Sosiologi: Teks Pengantar & Terapan*. Hlm 144-145

Mohtar Mas'ood dan Collin MacAndrews.

a. Modernisasi

Modernisasi disegala bidang akan berimplikasi pada komensialisme pertanian, industrial, meningkatkan arus urbanisasi, peningkatan kemampuan baca tulis, perbaikan pendidikan dan pengembangan media massa atau media komunikasi secara luas.

b. Terjadi perubahan struktur kelas sosial

Terjadinya perubahan kelas struktur kelas baru itu sebagai akibat dari terbentuknya kelas menengah dan pekerja baru yang meluas era industrialisasi dan modernisasi.

c. Pengaruh kaum intelektual dan meningkatnya komunikasi massa modern

Ide-ide baru seperti nasionalisme, liberalisme, membangkitkan tuntutan-tuntutan untuk berpartisipasi dalam pengambilan suara.

d. Adanya konflik diantara pemimpin-pemimpin politik

Pemimpin politik yang bersaing merebutkan kekuasaan sering kali untuk mencapai kemenangannya dilakukan dengan cara mencari dukungan massa.

e. Keterlibatan pemerintah yang semakin luas dalam unsur ekonomi, sosial dan budaya

Meluasnya ruang lingkup aktivis pemerintah ini seringkali merangsang timbulnya tuntutan-tuntutan organisasi untuk ikut serta dalam mempengaruhi pembuatan keputusan politik.

Sementara itu menurut Milbrath yang dikutip oleh Michael Rush dan

Althof memberikan alasan bervariasi mengenai partisipasi seseorang, yaitu:

Pertama, berkenaan dengan penerimaan perangsang politik. Milbrath menyatakan bahwa keterbukaan dan kepekaan seseorang terhadap perangsang politik melalui kontak-kontak pribadi, organisasi dan melalui media massa akan memberikan pengaruh bagi keikutsertaan seseorang dalam kegiatan politik.

Kedua, berkenaan dengan karakteristik sosial seseorang. Dapat disebutkan bahwa status ekonomi, karakter suku, usia jenis kelamin dan keyakinan (agama). Karakter seseorang berdasarkan faktor-faktor tersebut memiliki pengaruh yang relatif cukup besar terhadap partisipasi politik.

Ketiga, yaitu menyangkut sifat dan sistem partai tempat individu itu hidup. Seseorang yang hidup dalam negara yang demokratis, partai-partai politiknya cenderung mencari dukungan massa dan memperjuangkan kepentingan massa, sehingga massa cenderung berpartisipasi dalam politik.

Keempat, yaitu adanya perbedaan regional. Perbedaan ini merupakan aspek lingkungan yang berpengaruh terhadap perbedaan watak dan tingkah laku individu. Dengan perbedaan regional itu pula yang mendorong perbedaan perilaku politik dan partisipasi politik.

Partisipasi pemilih pemula dalam pilbup langsung memang erat kaitannya dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Banyak pertimbangan dalam menggunakan hak pilihnya. Bisa melihat dari sisi visi misi kandidat yang bagus meskipun tidak ada jaminan setelah kandidat terpilih. Selain itu berupa acuan yang digunakan untuk memilih adalah mereka kandidat yang memberikan

uang, dan kandidat yang diusung oleh partai yang dianggap pemilih pemula sesuai dengan kriterianya. Pada perilaku pemilih yang rasional pemilih akan menentukan pilihannya berdasarkan isu politik dan kandidat yang diajukan serta kebijakan yang dinilai menguntungkan baginya yang akan ia peroleh apabila kandidat pilihannya terpilih. Pemilih yang rasional tidak hanya pasif dalam berpartisipasi tetapi aktif serta memiliki kehendak bebas.

2) Bentuk Partisipasi Politik

Paige dalam Cholisin merujuk pada tinggi rendahnya kesadaran politik dan kepercayaan pemerintah (sistem politik menjadi empat tipe yaitu partisipasi aktif, partisipasi pasif tertekan (apatitis), partisipasi militan radikal, dan partisipasi pasif. Partisipasi aktif, yaitu apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah tinggi. Sebaliknya jika kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah rendah maka partisipasi politiknya cenderung pasif-tertekan (apatitis). Partisipasi militan radikal terjadi apabila kesadaran politik tinggi tetapi kepercayaan kepada pemerintah sangat rendah. Dan apabila kesadaran politik sangat rendah tetapi kepercayaan terhadap pemerintah sangat tinggi maka partisipasi ini disebut tidak aktif (pasif).

Berbagai bentuk-bentuk partisipasi politik yang terjadi di berbagai Negara dapat dibedakan dalam kegiatan politik yang berbentuk konvensional dan nonkonvensional termasuk yang mungkin legal (petisi) maupun ilegal (cara kekerasan atau revolusi). Bentuk-bentuk dan frekuensi partisipasi politik dapat dipakai sebagai ukuran untuk menilai stabilitas sistem politik, integritas

kehidupan politik, kepuasan atau ketidakpuasan warga negara. Bentuk-bentuk partisipasi politik yang dikemukakan oleh Almond yang dikutip oleh Mohtar Mas'ood yang terbagai dalam dua bentuk yaitu partisipasi politik konvensional dan partisipasi politik non konvensional. Adapun rincian bentuk partisipasi politik konvensional dan non konvensional.¹¹

a. Partisipasi politik konvensional

- 1) Pemberian suara atau voting
- 2) Diskusi politik
- 3) Kegiatan kampanye
- 4) Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan
- 5) Komunikasi individual dengan pejabat politik atau administratif

b. Partisipasi politik nonkonvensional

- 1) Pengajuan petisi
- 2) Berdemonstrasi
- 3) Konfrontasi
- 4) Mogok
- 5) Tindak kekerasan politik terhadap harta benda : pengrusakan, pemboman, pembakaran
- 6) Tindakan kekerasan politik terhadap manusia: penculikan, pembunuhan, perang gerilya, revolusi.

Kemudian David F. Roft dan Frank yang dikutip oleh A Rahman H.I bentuk partisipasi warga Negara berdasarkan intensitasnya. Intensitas terendah

¹¹ Mas'ood, M. M. (2011). Untuk Apa Negara? Renungan Akhir Tahun tentang Tanggung Jawab Penyelenggaraan Layanan Publik.hlm 57-58

adalah sebagai pengamat, intensitas menengah yaitu sebagai partisipan, dan intensitas tertinggi sebagai partisipan. Apabila intensitas kegiatan masyarakat dalam kegiatan politik dijenjangkan maka akan membentuk piramida partisipasi politik.

Kelompok paling bawah pada gambar piramida partisipasi politik yaitu kelompok yang sama sekali tidak terlibat dan tidak melakukan kegiatan politik. Oleh Roth dan Wilson disebut sebagai kelompok apolitis. Kelompok yang berada di atas apolitis yaitu kelompok pengamat, kelompok ini biasanya menghadiri rapat umum parpol, membicarakan politik, mengikuti perkembangan lewat media, memberikan suara dalam pemilu. Kemudian satu tingkat di atas kelompok pengamat yaitu kelompok partisipan. Pada kelompok ini aktivitas yang sering dilakukan seperti menjadi petugas kampanye, anggota aktif partai, dan kelompok kepentingan dalam proyek sosial. Kemudian kelompok yang paling atas di tingkat piramida adalah kelompok aktivis. Warga yang tergabung dalam kelompok ini tergolong sedikit jumlahnya, mereka merupakan pejabat partai sepenuh waktu, pemimpin partai atau pemimpin kepentingan.

Adapun bentuk partisipasi yang dilakukan oleh pemuda yakni berupa demonstrasi, pemogokan dan kegiatan protes. Cara yang biasanya dilakukan oleh pemilih pemula untuk turut dalam partisipasi pilbup yaitu bergabung dengan salah satu parpol didaerahnya mengikuti kegiatan kampanye, serta menghadiri diskusi politik didaerahnya.

Ciri utama yang dimiliki pemilih pemula yaitu latar belakang tingkat

partisipasi pemilih adalah pendidikan dan jenis kelamin. Setiap komunitas masyarakat memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Hal tersebut akan mempunyai pengaruh terhadap tingkat partisipasi politik dalam Pilbup. Serta menjadi bagian partisipasi dalam dinamika kegiatan politik

1.5.2 Teori Gender

Pengertian gender menurut Muhtar, bahwa gender dapat diartikan sebagai jenis kelamin sosial atau konotasi masyarakat untuk menentukan peran sosial berdasarkan jenis kelamin. Sementara Fakih mendefinisikan gender sebagai suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan kultural. Istilah gender dibedakan dari istilah seks. Oakley, ahli sosiologi Inggris, merupakan orang yang mula-mula memberikan pembedaan dua istilah itu.

Istilah gender merujuk kepada perbedaan karakter laki-laki dan perempuan berdasarkan konstruksi sosial budaya, yang berkaitan dengan sifat, status, posisi, dan perannya dalam masyarakat. Istilah Seks merujuk kepada perbedaan jenis kelamin laki-laki dan perempuan secara biologis terutama yang berkaitan dengan prokreasi dan reproduksi. Laki-laki dicirikan dengan adanya sperma dan penis serta perempuan dicirikan dengan adanya sel telur, rahim, vagina, dan payudara. Ciri jenis kelamin secara biologis tersebut bersifat bawaan, permanen, dan tidak dapat dipertukarkan¹².

Selanjutnya, yang dimaksud dengan gender adalah cara pandang atau persepsi manusia terhadap perempuan atau laki-laki yang bukan didasarkan

¹² Abdullah, S. (2004). Akuntansi sektor publik akuntansi keuangan daerah. *KINERJA*, 8(2), 209-210.hlm 11

pada perbedaan jenis kelamin secara kodrati biologis. Gender dalam segala aspek kehidupan manusia mengkreasikan perbedaan antara perempuan dan laki-laki termasuk kreasi sosial kedudukan perempuan yang lebih rendah dari pada laki-laki. Misalnya, bahwa perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, emosional, atau keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, perkasa. Ciri dari sifat itu sendiri merupakan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan. Artinya ada laki-laki yang emosional, lemah lembut, keibuan, sementara juga ada perempuan yang kuat, rasional dan perkasa.

Dari berbagai pendapat di atas peneliti menyimpulkan bahwa istilah gender merujuk pada nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat berdasarkan jenis kelamin. Nilai-nilai tersebut dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan dapat dipertukarkan. Itu terjadi karena gender tidak melekat pada jenis kelamin tetapi pada pelabelan masyarakat.

Teori nurture menggambarkan adanya perbedaan perempuan dan laki-laki yang pada hakikatnya adalah hasil dari konstruksi sosial budaya sehingga menghasilkan peran dan tugas yang berbeda. Perbedaan tersebut menyebabkan perempuan selalu tertinggal dan terabaikan peran dan kontribusinya dalam hidup berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Perjuangan untuk persamaan dipelopori oleh orang-orang yang konsen memperjuangkan kesetaraan perempuan dan laki-laki (kaum feminis) yang cenderung mengejar “kesamaan” yang kemudian dikenal dengan istilah kesamaan kuantitas (perfect equality)¹³.

¹³ Alifiaulahtin Utaminingsih, “Gender dan Wanita Karir”, (Malang: UB Press, 2017),

Teori Equilibrium, Disamping kedua aliran tersebut, terdapat paham yang dikenal dengan keseimbangan (equilibrium) yang menekankan pada konsep kemitraan dan keharmonisan dalam hubungan antara perempuan dan laki-laki. Pandangan ini tidak mempertentangkan antara kaum perempuan dan laki-laki karena keduanya harus bekerjasama dalam kemitraan dan keharmonisan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan berbangsa. Karena itu, penerapan kesetaraan dan keadilan gender harus memperhatikan masalah kontekstual (yang ada pada tempat dan waktu tertentu) dan situasional (sesuai situasi/keadaan), bukan berdasarkan perhitungan secara matematis (jumlah/quota) dan tidak bersifat universal. Kesetaraan gender dapat terjadi dengan memperhatikan masalah kontekstual (yang ada pada tempat dan waktu tertentu) dan situasi atau keadaan. Dengan kata lain laki-laki dan perempuan harus bekerjasama karena dalam teori ini ditekankan keharmonisan dalam hubungan laki-laki dan perempuan. Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam berbagai bentuk ketidakadilan, yakni¹⁴:

1. Gender dan Marjinalisasi Perempuan

Proses marjinalisasi, yang mengakibatkan kemiskinan, sesungguhnya banyak sekali terjadi dalam masyarakat dan negara yang menimpa kaum laki-laki dan perempuan, yang disebabkan oleh berbagai kejadian, misalnya penggusuran, bencana alam atau proses eksploitasi. Namun ada salah satu bentuk pemiskinan atas satu jenis kelamin tertentu, dalam hal ini perempuan, disebabkan oleh gender. Ada beberapa perbedaan jenis dan

hlm. 19. 1

¹⁴ Ibid, hlm 22.

bentuk, tempat dan waktu serta mekanisme proses marginalisasi kaum perempuan karena perbedaan gender tersebut. Dari segi sumbernya biasa berasal dari kebijakan pemerintah, keyakinan, tafsiran agama, keyakinan tradisi dan kebiasaan atau bahkan asumsi ilmu pengetahuan.

2. Gender dan Subordinasi

Subordinasi karena gender tersebut terjadi dalam segala macam bentuk yang berbeda dari tempat ke tempat dan dari waktu ke waktu. Di masyarakat, dulu ada anggapan bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, karena pada akhirnya akan ke dapur juga. Bahkan, pemerintah pernah memiliki peraturan bahwa jika suami akan pergi belajar (jauh dari keluarga) dia bisa mengambil keputusan sendiri. Sedangkan bagi istri yang hendak tugas belajar ke luar negeri harus seizin suami. Dalam rumah tangga masih sering terdengar jika keuangan keluarga sangat terbatas, dan harus mengambil keputusan untuk menyekolahkan anak-anaknya maka anak laki-laki akan mendapatkan prioritas utama. Praktik seperti itu sesungguhnya berangkat dari kesadaran gender yang tidak adil.

3. Gender dan Stereotipe

Secara umum stereotipe adalah pelabelan atau penandaan terhadap suatu kelompok tertentu. Celaknya stereotipe selalu merugikan dan menimbulkan ketidakadilan. Banyak sekali ketidakadilan terhadap jenis kelamin tertentu, umumnya perempuan, yang bersumber dari pandangan (stereotipe) yang dilekatkan kepada mereka. Misalnya, penandaan yang berawal dari asumsi bahwa perempuan bersolek adalah dalam rangka

memencing lawan jenisnya, maka setiap ada kasus kekerasan atau pelecehan seksual selalu dikaitkan dengan stereotipe ini.

4. Gender dan Kekerasan

Kekerasan (violence) adalah serangan atau invasi (assault) terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Kekerasan terhadap sesama manusia pada dasarnya berasal dari berbagai sumber, namun salah satu kekerasan terhadap satu jenis kelamin tertentu yang disebabkan oleh anggapan gender. Kekerasan yang disebabkan oleh bias gender ini disebut gender-related violence. Pada dasarnya, kekerasan gender disebabkan oleh ketidaksetaraan kekuatan yang ada dalam masyarakat.

5. Gender dan Beban Kerja

Adanya anggapan bahwa kaum perempuan memiliki sifat memelihara dan rajin, serta tidak cocok untuk menjadi kepala rumah tangga, berakibat bahwa semua pekerjaan dalam rumah tangga menjadi tanggung jawab kaum perempuan. Konsekuensinya, banyak kaum perempuan yang harus bekerja keras dan lama untuk menjaga kebersihan dan kerapian rumah tangganya, mulai dari membersihkan dan mengepel lantai, memasak, mencuci, mencari air untuk mandi hingga memelihara anak. Di kalangan keluarga miskin beban yang sangat berat ini harus ditanggung oleh perempuan sendiri. Terlebih-lebih jika si perempuan tersebut harus bekerja, maka ia harus memikul beban kerja ganda.

1.5.3 Teori Patriarki

Dalam buku *Theorizing Patriarchy*, Walby mendefinisikan patriarki

sebagai struktur sosial dan prakteknya dimana laki-laki mendominasi, mengoperasikan dan mengeksploitasi perempuan. ia juga mengidentifikasi adanya 6 struktur patriarki, yaitu produksi rumah tangga, pekerjaan yang dibayar, negara, kekerasan laki-laki, seksualitas dan budaya yang bersama-sama berperan untuk dapat menangkap kedalam, kegunaan dan keterlibatan perempuan. Semua ini hanya termanifestasi dalam institusi keluarga, di mana begitu seorang perempuan menikah dengan laki-laki, maka perbedaan biologis ini akan melahirkan peran-peran gender yang erat kaitannya dengan masalah bioslogis. Karenanya peranan feminis radikal sering menyerang keberadaan institusi keluarga dan sistem patriarki. Keluarga dianggap sebagai institusi yang melahirkan dominasi laki-laki, sehingga perempuan lebih sering ditindas. Aliran ini berpendapat bahwa struktur masyarakat dilandaskan pada hubungan hierarkis berdasarkan jenis kelamin. Laki-laki sebagai suatu kategori sosial mendominasi kaum perempuan sebagai kategori sosial yang lain, karena kaum laki-laki diuntungkan dengan adanya subordinasi perempuan. Dominasi laki-laki atau subordinasi perempuan ini, menurut mereka, merupakan suatu model konseptual yang dapat menjelaskan berbagai bentuk penindasan yang lain¹⁵.

Terjadinya kendala lain dari peranan perempuan adalah akibat adanya pertarungan sosial budaya ditengah masyarakat yang menganut sistem patriarki. Seringkali perempuan yang bekerja sekaligus menjadi ibu rumah tangga digambarkan sebagai peran ganda bagi seorang perempuan, dan hal itu akan memunculkan tekanan atau tuntutan yang berbeda dalam setiap ranah.

¹⁵ Sylvia Walby, *Theorizing Patriarchy*, (Cambridge: Basil Blackwell, 1990), hlm. 20

Adanya pertukaran peran dalam keluarga yang menunjukkan bahwa laki-laki bisa saja melakukan pekerjaan perempuan bahkan sebaliknya masih belum bisa sepenuhnya diterima oleh norma dan nilai masyarakat.

Apabila dikaji melalui aspek konstruksi gender, adanya konflik tersebut disebabkan karena laki-laki diberikan posisi istimewa untuk dibebaskan dari segala sesuatu yang berhubungan dengan aktivitas domestik namun tidak dengan perempuan¹⁶. Perempuan dalam hal ini selalu dituntut untuk sempurna dalam hal domestiknya. Perempuan seolah dituntut untuk konsekuen dengan fitrah kewanitaannya, tetapi di sisi lain status sosial dan tuntutan ekonomi memacu perempuan untuk dapat bekerja di luar rumah sebagai wujud emansipasi.

Patriarki adalah sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai sosok otoritas utama yang sentral dalam organisasi sosial. Posisi laki-laki lebih tinggi dari pada perempuan dalam segala aspek kehidupan sosial, budaya dan ekonomi. Ayah memiliki otoritas terhadap ibu, anak-anak dan harta benda. Secara tersirat sistem ini melembagakan pemerintahan dan hak istimewa laki-laki dan menuntut subordinasi perempuan. Bahkan dinilai sebagai penyebab dari penindasan terhadap perempuan.

Patriarki adalah konsep yang digunakan dalam ilmu-ilmu sosial, terutama dalam Antropologi dan studi referensi feministas ke distribusi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan di mana laki-laki memiliki keunggulan dalam satu atau lebih aspek, seperti penentuan garis keturunan (keturunan patrilineal

¹⁶ Astriani, desintha,dwi, "Dilema Peran dan Konstruksi Ibu Yang Baik", (Jurnal Perempuan : Karrier Dan Rumah Tangga, Vol 8, No 1 , Maret 2013) hlm. 43.

eksklusif dan membawa nama belakang), hak-hak anak sulung, otonomi pribadi dalam hubungan sosial, partisipasi dalam status publik dan politik atau agama atau atribusi dari berbagai pekerjaan laki-laki dan perempuan ditentukan oleh pembagian kerja secara seksual. Pengertian lainnya mengemukakan patriarki adalah sistem sosial hubungan gender yang di dalamnya terdapat ketidaksetaraan gender. Laki-laki bermonopoli akan seluruh peran.

Relasi gender adalah relasi sosial antara laki-laki dengan perempuan dan melekat dalam beragam institusi sosial dan struktur sosial. Konsep patriarki menggabungkan konsep hubungan-hubungan gender, dan kemudian berkembang menjadi dua pandangan. Pertama, meliputi ketidakadilan yang sering terjadi dalam relasi gender. Kedua, menarik perhatian kepada keterhubungan antara beberapa aspek hubungan-hubungan gender yang berbeda yang kemudian membentuk sistem sosial. Dalam berbagai aspek kehidupan sosial terdapat ketidakadilan gender, di mana perempuan sering tidak diuntungkan jika dibanding dengan laki-laki. Contohnya, dalam pekerjaan, terdapat kesenjangan gender dalam upah, di mana perempuan rata-rata di bayar lebih rendah dari laki-laki. Perempuan mengerjakan pekerjaan domestik yang tidak proporsional, seperti pekerjaan rumah tangga dan mengurus anak. Perempuan lebih terlihat miskin dari pada laki-laki, terutama dalam usia tua. Laki-laki mengambil porsi yang berlebih dalam kekuasaan politik, misalnya menjadi anggota parlemen. Perempuan memiliki pengalaman kekerasan dari laki-laki, seperti kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual. Laki-laki terlihat memiliki pengaruh untuk membentuk kultur dan

standar moral, misalnya sebagai editor koran dan pemuka agama. Tentu saja ada perkecualian individual dari kalimat-kalimat tersebut, jika yang dimaksudkan adalah rata-rata peristiwa ketidakadilan gender, bukan apa yang dialami setiap laki-laki atau perempuan. Pola ketidakadilan gender tersebut berulang terus-menerus di dalam struktur sosial.

Terdapat beragam definisi patriarki. Beberapa definisi awal cenderung memfokuskan diri kepada peran laki-laki dewasa sebagai kepala rumah tangga (lihat kinship, family and marriage), meliputi fokus kepada generasi dan satu lembaga sosial yang spesifik. Definisi yang paling akhir saat ini tampak lebih leluasa, di mana lembaga-lembaga sosial dipandang berkontribusi dalam membentuk patriarki, dan keluarga menjadi salah satunya.

Konsep patriarki mengungkap adanya keterhubungan beragam aspek yang berbeda dalam ketidakadilan gender. Ada sebab yang saling berkaitan antara ketidakadilan gender dalam representasi politik dihubungkan dengan ketidakadilan dalam tempat kerja. Ketika ketidakadilan gender dalam kekuasaan politik menurun, jika perempuan meningkatkan representasinya di parlemen dan kabinet, muncul kecenderungan meningkatnya jumlah peraturan yang mendukung perempuan dalam pekerjaan, yang oleh karenanya mampu mempersempit jurang pemberian upah secara gender. Aspek yang lain, dimensi atau ranah patriarki dihubungkan. Keterhubungan ini berarti menjadi bukti adanya sistem ketidakadilan gender, bukan semata sekumpulan keterpisahan dan peristiwa-peristiwa yang tidak berkait satu dengan yang lain.

Pernyataan yang menunjuk adanya sistem sosial di dalam konsep

patriarki menjadi penting bagi analisis Sosiologis mengenai ketidakadilan gender yang kemudian dapat melahirkan penjelasan yang lebih mendalam dan kuat terhadap aspek-aspek yang beragam dalam hubungan gender. Hal itu memungkinkan untuk membangun hubungan antara tingkat analisis yang beragam, struktur sosial dengan fenomena pada tingkat individual. Contohnya, perempuan membuat keputusan, namun tidak pada situasi saat pengambilan keputusan itu dilakukan: perempuan “memilih” pekerjaan paruh waktu dengan bayaran yang rendah karena hanya itulah pekerjaan yang cocok dengan waktu sekolah anak yang membuat pengasuhan anak semakin tidak berkualitas. Penjelasan mengenai “pilihan” perempuan tersebut akan semakin menguat jika dimasukkan unsur institusi sosial dan struktur sosial dalam analisis.

Beragam bentuk patriarki waktu dan tempat berbeda. Salah satu dimensi ragam tersebut mencakup patriarki domestic. Pada umumnya, perempuan cenderung tersisih dari pekerjaan-pekerjaan dengan upah tinggi karena jenis pekerjaan yang dapat diambil perempuan sudah ditentukan oleh laki-laki¹⁷. Dimensi ini bervariasi bergantung seberapa jauh perempuan dikendalikan dalam ruang domestik dan sejauh mana pula perempuan hadir dalam lembaga-lembaga publik, seperti pekerjaan, universitas dan parlemen. Dimensi kedua adalah tingkat ketidakadilan gender, contohnya seberapa besar jurang pemberian upah secara gender.

Modernitas menjadi saksi bagi kecenderungan adanya transformasi

¹⁷ Bhasin, S., Storer, T. W., Berman, N., Callegari, C., Clevenger, B., Phillips, J., ... & Casaburi, R. (1996). The effects of supraphysiologic doses of testosterone on muscle size and strength in normal men. *New England Journal of Medicine*, 335(1), 1-7.

bentuk patriarki dari bentuk domestik ke publik. Transformasi ini hanya sebagian berhubungan dengan perubahan dalam tingkat ketidakadilan, yang karenanya, dibutuhkan analisis yang terpisah terhadap dimensi tersebut. Arah modernisasi patriarki tidaklah seragam atau universal, melainkan sangat bergantung kepada arah modernisasi itu sendiri di mana perubahan-perubahan awal dan sejumlah hubungan-hubungan sosial yang lain memengaruhi arah perubahan tersebut. Konsep patriarki terkadang mengundang kontroversi. Hal itu sering terjadi karena munculnya kesalahpahaman. Terutama, konsep patriarki sering diasumsikan bahwa analisis yang menggunakan konsep patriarki mestilah universalis dan esensialis, menurunkan perbedaan sosial antara laki-laki dengan perempuan pada sisi perbedaan biologis semata, dan mengabaikan perbedaan pola hubungan gender pada waktu dan tempat yang berbeda. Misalnya saja konsep kebebasan dan kemandirian bagi perempuan yang diproklamirkan oleh Islam sering disalahpahami. Kebebasan itu seringkali diidentikkan dengan kebebasan bergaul dengan lawan jenis dan eksploitasi tubuh untuk kepentingan seksual. Akibatnya banyak muncul di permukaan adalah perempuan-perempuan yang mempertontonkan keindahan tubuhnya untuk kepentingan komersial dan menjadi objek kapitalisme..

Sebagai konsekuensinya, terdapat perkembangan istilah dalam patriarki untuk menangkap konsep sistem sosial ketidaksetaraan gender. Hal itu termasuk, misalnya, istilah “rezim gender”. Penggunaan istilah gender yang lebih dari penggunaan istilah patriarki telah menghapus keraguan mengenai karakter sosial dari sistem sosial, lebih dari sekedar dasar biologis sistem sosial

itu sendiri. Selanjutnya, istilah “rezim” lebih halus konotasinya daripada sistem, yang menandai pentingnya interaksi sejumlah hubungan-hubungan sosial lainnya seperti, kelas dan etnisitas, dalam membentuk hubungan-hubungan gender. Dalam praktiknya, kedua istilah tersebut saling bertukar secara efektif, memaknai hal yang sama, yaitu sistem sosial ketiakteraturan hubungan-hubungan gender. Penambahan konsep patriarki ke dalam perbendaharaan kata Sosiologi memfasilitasi analisis hubungan-hubungan gender pada tingkat struktur dan sistem sosial, berkembang melebihi konsepsi gender yang ditentukan oleh biologi atau psikologi.

1. Budaya Patriarki

Budaya patriarki merupakan budaya dimana laki-laki mempunyai kedudukan lebih tinggi dari perempuan. Dalam budaya ini, ada perbedaan yang jelas mengenai tugas dan peranan perempuan dan laki-laki dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya dalam keluarga. Budaya patriarki secara turun temurun membentuk perbedaan perilaku, status dan otoritas antara laki-laki dan perempuan di masyarakat yang kemudian menjadi hirarki gender.

Laki-laki sebagai pemimpin atau kepala keluarga memiliki otoritas yang meliputi kontrol terhadap sumber daya ekonomi, dan suatu pembagian kerja secara seksual dalam keluarga. Hal ini menyebabkan perempuan memiliki akses yang lebih sedikit di sektor publik dibandingkan laki-laki. Patriarki adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan sistem sosial di mana kaum laki-laki sebagai suatu kelompok mengendalikan kekuasaan atas

kaum perempuan. Islam bukan agama patriarki.

Semua manusia adalah setara dan berasal dari sumber yang satu yaitu Allah swt, yang membedakan di antara manusia hanyalah prestasi dan kualitas takwa. Sebagaimana yang tercantum dalam Alquran surat alDzariyat 51: 56 yang artinya: Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.¹⁸

Islam tidak mengajarkan bahwa kedudukan perempuan berada di bawah seorang laki-laki. Islam mengajarkan bahwa seorang perempuan ketika menikah maka tanggung jawab atas dirinya berada di diri laki-laki yang menjadi suaminya. Islam memberikan penghormatan yang besar terhadap perempuan, karena sebaik-baiknya laki-laki muslim adalah yang berbuat baik kepada istrinya. Islam memberikan kehormatan yang tinggi bagi para muslimah. Tidak ada kewajiban bagi mereka untuk mencari nafkah. Bukannya menggambarkan perempuan sebagai orang yang lemah dan tukang membebani laki-laki, tapi ini adalah penghormatan Islam kepada perempuan sehubungan dengan tugas mereka yang amat vital di dalam rumah keluarganya. Islam memberikan kewajiban dan hak yang sama bagi laki-laki maupun perempuan, namun laki-laki diberikan satu tingkat lebih tinggi dibanding perempuan bukan untuk merendahkan tapi dalam sebuah rumah tangga laki-laki menjadi imam yang memiliki tanggung jawab serta tugas yang tidak mudah dalam menjaga istri dan anak-anaknya kelak.

2. Budaya Patriarki Picu Kekerasan Terhadap Perempuan

¹⁸ Mulia, S. M. (2014). *Kemuliaan perempuan dalam Islam*. Elex Media Komputindo.
Hlm 32

Kriminalitas seakan tak mau henggang di negeri ini. Bagaimana tidak, persoalan ekonomi, sosial maupun budaya di masyarakat telah mendorong adanya kejahatan, baik itu kejahatan pencurian, penganiayaan, tindak asusila, pemerkosaan hingga kasus pembunuhan. Dari tindak kriminal yang ada, tak sedikit perempuan menjadi korban kekerasan atas aksi kejahatan, khususnya pemerkosaan dan tindak asusila. Budaya patriarki terus membelenggu, mengakibatkan laki-laki memandang rendah perempuan dan berbuat semenamena. Misalnya saja kasus Priya Puspita Restanti pada tahun 2013 silam, salah satu siswi SMK di Sleman yang telah menyita perhatian publik.

Aksi kebiadaban yang dilakukan oleh ayah dan anak, juga keterlibatan oknum aparat kepolisian mencederai moral bangsa. Tindakan pemerkosaan dan pembunuhan dilakukan hanya untuk mencari kesenangan sesaat, dinilai melecehkan harkat dan martabat perempuan. Belum luput dari itu, lagi, kasus serupa (asusila) dilakukan oleh seorang nelayan menyetubuhi anak tirinya dari umur 12 tahun. Rentannya posisi perempuan sebagai dalang citra buruk, menjadi corong menguatnya aksi kriminalitas.

Perempuan sering menjadi ancaman dan sasaran dalam dunia kriminal. Terlebih dengan tabiat hawa nafsu laki-laki yang lebih besar dibanding perempuan, memicu untuk berbuat keji. Kemolekan perempuan telah meracuni pikiran dan niat yang buruk. Inilah bentuk keroposnya akhlak. Ada kalanya keimanan seseorang turun dan naik. Inilah yang harusnya menjadi tantangan laki-laki untuk mengendalikan syahwat,

tentunya juga didukung oleh lingkungan perempuan yang memiliki akhlak yang baik pula, tidak mengumbar keindahan tubuh. Refleksi akan lahirnya Hari Kartini belum mampu menjadi cahaya dalam memperjuangkan emansipasi perempuan. Hari Kartini hanya dianggap isapan formalitas semata, bukan menjadi wajah refleksi untuk memperjuangkan hak yang sama. Terbukti dengan masih bergulirnya tindakan yang menyudutkan perempuan, yakni perlakuan buruk terhadapnya. Hal ini sudah membudaya di masyarakat yang harus dituntaskan, mengingat setiap manusia memiliki hak yang sama serta wajib menghormati atas kepribadian. Dalam Islam pun, perempuan dimuliakan. Tidak ada sekat di antara laki-laki, terkecuali jika mereka melakukan perbuatan keji. Hal ini mengindikasikan bahwa pola dan budaya masyarakat yang patut dibenahi, bukan karena perempuannya.

Budaya patriarki semacam ini, haruslah menjadi cerminan untuk terus memperjuangkan hak perempuan. Menghilangkan sebuah budaya tidaklah mudah, akan tetapi untuk menguranginya masih bisa menjadi harapan. Mensubtitusikan budaya yang lebih baik, mencitrakan perempuan sebagai sosok yang mulia, serta memperbaiki akhlak pribadi manusia bisa menjadi langkah kecil yang nyata untuk menumpas paradigma patriarki. Bila hal ini dilakukan, maka tingkat kriminalitas dengan korban perempuan akan ikut menurun juga.

3. Dampak Patriarki Terhadap Konflik Yang Terjadi Di Indonesia

Menurut Bhasin menjelaskan bahwa kata patriarki secara harafiah berarti kekuasaan bapak atau “patriakh (patriarch)”. Pada awalnya patriarki

digunakan untuk menyebut suatu jenis “keluarga yang dikuasai oleh kaum laki-laki”, yaitu rumah tangga besar patriarchy yang dikuasai oleh laki-laki. Secara detail, patriarki merujuk pada sebuah bentuk organisasi rumah tangga dimana laki-laki mendominasi anggota keluarga yang lain dan mengontrol produksi ekonomi rumah tangga.

Patriarki dipandang sebagai ideologi bagaimana laki-laki mendominasi. Masyarakat yang patriarkis adalah masyarakat yang dimana laki-laki memiliki kekuatan dan kontrol. Perempuan biasanya dieksploitasi, dirugikan dan mempunyai status yang lebih rendah. Kultur patriarki mempengaruhi pola pikir masyarakat. Perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan, baik bagi kaum laki-laki dan terutama terhadap kaum perempuan.

Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam pelbagai bentuk ketidakadilan yaitu marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, subordinasi anggapan tidak penting dalam keputusan politik, pembentukan stereotipe atau melalui pelabelan negatif, kekerasan, beban kerja yang panjang dan lebih banyak serta sosialisasi ideologi peran gender.

Sementara itu peran-peran subordinasi paling umum diperankan oleh perempuan dalam hubungan kekuasaan: perempuan berperan sebagai korektor (fixer), ia ingin hubungan itu stabil, harmonis dan menyenangkan; perempuan sebagai penyenang (pleaser), ia mencoba memenuhi harapan laki-laki; perempuan sebagai suhuda (martyr): ia ingin pasangannya hidup senang sekalipun mengorbankan dirinya. Ketidakadilan gender yang ada

dalam suatu rumah tangga akan menghasilkan konflik diantara suami istri yang jika dibiarkan terus berlanjut akan mengakibatkan perceraian. Hubungan perkawinan antar suami dan istri merupakan ikatan sentral persatuan keluarga di dalam masyarakat, apabila ikatan ini pecah, keluarga juga akan pecah¹⁹.

Dalam kehidupan rumah tangga, laki-laki ditempatkan secara budaya sebagai kepala rumah tangga sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga dimana posisinya selalu berada di bawah dominasi laki-laki. Perempuan dipandang lebih utama untuk berkiprah di sektor domestik, membersihkan rumah, memasak, mencuci, dan mengasuh anak. Jika ia bekerja di sektor publik, disamping harus memilih pekerjaan yang sesuai dengan kodratnya, dia tetap sebagai pembantu suami dalam memenuhi kebutuhan nafkah keluarga. Konflik di dalam masyarakat Indonesia dapat diawali dari konflik rumah tangga, hal ini terjadi karena rumah tangga merupakan komunitas terkecil yang memiliki pemahaman patriarki.

Secara keseluruhan (kecuali Minangkabau), masyarakat Indonesia menganut patriarki sehingga pemikiran laki-laki lebih dominan dalam masyarakat pun semakin kuat. Selain itu, sebagian besar konflik yang terjadi dikarenakan maskulinitas kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Hanya sedikit yang mempertimbangkan kefemininitasan. Masyarakat Indonesia secara kultural memang sangat kental dengan adat patriarki. Hampir semua konflik yang terjadi karena adanya kebijakan penyelesaian dengan

¹⁹ Ihromi, T. (1999). *Bunga rampai sosiologi keluarga*. Yayasan Obor Indonesia.hlm 167

kekerasan. Bahkan, ketika Presiden Indonesia perempuan yakni Megawati Soekarnoputri pun menggunakan kebijakan Daerah Operasi Militer (DOM) bagi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang menggunakan kekuatan militer yang sangat membuat traumatis bagi masyarakat Aceh.

1.5.4 Konsep Modal Sosial

Modal sosial di yakini sebagai salah satu komponen utama dalam menggerakkan kebersamaan, mobilitas ide, kesaling percayaan dan kesaling menguntungkan untuk mencapai kemajuan bersama. Teori modal sosial terutama berakar pada gagasan kepercayaan, norma, dan jaringan informal. Berikut adalah pengertian modal sosial menurut para ahli :

Coleman mendefinisikan modal sosial dengan fungsinya. Ini bukan entitas tunggal, namun kombinasi dari entitas yang berbeda dimana memiliki dua karakteristik yang sama yaitu merupakan aspek dari struktur sosial, dan memfasilitasi tindakan tertentu dari individu yang berada dalam struktur itu. Entitas tersebut termasuk dalam kewajiban, harapan, kepercayaan, dan arus informasi. Modal sosial melekat pada struktur hubungan antara pelaku dan hal Ini memfasilitasi tindakan pelaku individual dalam membentuk dasar dari modal sosial. Coleman mengidentifikasi tiga bentuk modal sosial: timbal balik (termasuk kepercayaan), saluran informasi dan arus informasi, dan norma-norma diberlakukan oleh sanksi.

Putnam mendefinisikan modal sosial sebagai suatu fitur organisasi sosial, seperti kepercayaan, norma, dan jaringan yang dapat meningkatkan efisiensi masyarakat dengan memfasilitasi tindakan terkoordinasi. Putnam

mengatakan bahwa modal sosial mengacu pada hubungan antara individu-individu serta jaringan sosial dan norma-norma juga kepercayaan sehingga ia beranggapan bahwa jejaring sosial memiliki nilai dan kontak sosial mempengaruhi produktivitas individu dan kelompok.

Cox mendefinisikan modal sosial sebagai suatu rangkaian proses hubungan antar manusia yang ditopang oleh jaringan, norma-norma, dan kepercayaan sosial yang memungkinkan efisien dan efektifnya koordinasi dan kerjasama untuk keuntungan dan kebajikan bersama.

Fukuyama mendefinisikan modal sosial dalam hal kepercayaan sebagai suatu kemampuan masyarakat dalam bekerja sama untuk tujuan umum dalam kelompok dan organisasi. Ia berpendapat bahwa kepercayaan interpersonal merupakan dasar untuk hubungan sosial yang muncul. Saling percaya akan dapat meningkatkan kerjasama antara individu, mengurangi biaya transaksi, dan meningkatkan transaksi bisnis. Fukuyama menekankan pada kualitas dalam hubungan sosial (kepercayaan interpersonal, norma-norma bersama dan pemahaman, dll), yang memungkinkan orang untuk bergaul dengan orang lain, dan membantu untuk mengembangkan modal sosial.

Bank dunia mendefinisikan modal sosial sebagai sesuatu yang merujuk ke dimensi institusional, hubungan- hubungan yang tercipta, dan norma-norma yang membentuk kualitas dan kuantitas hubungan sosial dalam masyarakat.

Cohen dan Prusak memberikan pengertian bahwa modal sosial sebagai stok dari hubungan yang aktif antar masyarakat. Setiap pola hubungan yang terjadi diikat oleh kepercayaan (trust), kesaling pengertian (mutual

understanding) dan nilai-nilai bersama (shared value) yang mengikat anggota kelompok untuk membuat kemungkinan aksi bersama dapat dilakukan secara efisien dan efektif.

Lin mendefinisikan modal sosial sebagai suatu investasi dalam hubungan sosial dengan hasil yang diharapkan di dalam pasar. Secara operasional, Lin mendefinisikan modal sosial sebagai suatu sumber tertanam dalam jaringan sosial yang dapat diakses dan digunakan oleh pelaku untuk tindakan tertentu.

Robison et all. menulis bahwa dalam pandangan mereka, modal sosial dapat didekonstruksi menjadi seperti, di mana ia berada, apa yang menghasilkan (bagaimana digunakan), dan bagaimana menghasilkan. Namun demikian, gagasan dasar dari definisi mereka hampir memiliki kerangka yang sama dengan milik Bourdieu yang mengatakan bahwa, "Ini bukan apa yang Anda tahu, tapi siapa yang anda tahu."

Hasbullah mendefinisikan bahwa modal sosial adalah sumber daya yang dapat dipandang sebagai investasi untuk mendapatkan sumber daya baru. Sumber daya (resources) adalah sesuatu yang dapat dipergunakan untuk di konsumsi, di simpan dan di investasikan.

Modal sosial adalah atribut dari seorang individu (individual yang baik) atau atribut dari masyarakat (kolektif yang baik).

1) Individual Level

Modal sosial sebagian besar sebagai atribut dari seorang individual. Modal sosial individu mengacu pada orang yang potensial untuk

mengaktifkan dan efektif dalam memobilisasi jaringan koneksi sosial berdasarkan pengakuan dan dikelola oleh simbolik dan material pertukaran. Premis dasar di balik modal tingkat individu adalah bahwa seorang individu yang menciptakan, memelihara, dan kemudian mendapatkan keuntungan dari modal sosial tersebut. Selain itu, individu adalah unit alami pengamatan dan pengukuran modal sosial. Sejauh mana seorang individu memiliki akses ke sumber daya melalui modal sosial tergantung pada koneksi orang, kekuatan koneksi ini, dan sumber daya yang tersedia untuk koneksi ini.

2) *Collective Level*

Modal sosial tidak hanya sekedar aspek individu, tetapi juga aspek masyarakat. Sebagai atribut dari masyarakat, modal sosial mengacu pada kualitas jaringan dan hubungan yang memungkinkan individu untuk bekerja sama dan bertindak secara kolektif. Modal sosial kolektif menekankan modal sosial sebagai kolektif dimana seluruh masyarakat bisa mendapatkan keuntungan. Premis balik modal sosial kolektif adalah bahwa karena hubungan sosial memerlukan dua atau lebih individu oleh sebab itu modal sosial adalah kolektif. Pada tingkat kolektif, modal sosial sering diambil untuk diwakili oleh norma-norma, kepercayaan, dan kohesi sosial. Ini adalah kualitas jaringan dan hubungan (kepercayaan, norma, aturan hukum, dll) yang menumbuhkan kerjasama.

Sosial Hasbullah meyakini bahwa modal sosial terletak pada bagaimana kemampuan masyarakat dalam suatu entitas atau kelompok untuk bekerjasama membangun suatu jaringan untuk mencapai tujuan

bersama. unsur - unsur modal sosial dapat di bagi menjadi sebagai berikut yaitu :

1) Partisipasi dalam Suatu Jaringan

Modal sosial tidak dibangun hanya oleh satu individu, melainkan akan terletak pada kecenderungan yang tumbuh dalam suatu kelompok untuk bersosialisasi sebagai bagian penting dari nilai-nilai yang melekat. Modal sosial akan kuat tergantung pada kapasitas yang ada dalam kelompok masyarakat untuk membangun sejumlah asosiasi berikut membangun jaringannya. Salah satu kunci keberhasilan membangun modal sosial terletak pula pada kemampuan sekelompok orang dalam suatu asosiasi atau perkumpulan dalam melibatkan diri dalam suatu jaringan hubungan sosial.

2) *Reciprocity*

Modal sosial senantiasa diwarnai oleh kecenderungan saling tukar kebaikan antar individu dalam suatu kelompok atau antar kelompok itu sendiri. Pola pertukaran ini bukanlah sesuatu yang dilakukan secara resiprokal seketika seperti dalam proses jual beli, melainkan suatu kombinasi jangka pendek dan jangka panjang dalam nuansa altruism (semangat untuk membantu dan mementingkan kepentingan orang lain). Pada masyarakat dan pada kelompok sosial yang terbentuk, yang didalamnya memiliki bobot resiprositas kuat akan melahirkan suatu masyarakat yang memiliki tingkat modal sosial yang tinggi

3) *Trust*

Trust atau kepercayaan adalah suatu bentuk keinginan untuk

mengambil resiko dalam hubungan-hubungan sosialnya yang didasari oleh perasaan yakin bahwa yang lain akan melakukan sesuatu seperti yang diharapkan dan akan senantiasa bertindak dalam suatu pola tindakan yang saling mendukung, paling tidak yang lain tidak akan bertindak merugikan diri dan kelompoknya sedangkan dalam pandangan yang dikemukakan oleh Fukuyama menyatakan bahwa trust adalah sikap saling mempercayai di masyarakat yang memungkinkan masyarakat tersebut saling bersatu dengan yang lainnya dan memberikan kontribusi pada peningkatan modal sosial.

4) Norma Sosial

Norma-norma sosial akan sangat berperan dalam mengontrol bentukbentuk perilaku yang tumbuh dalam masyarakat. Pengertian norma itu sendiri adalah sekumpulan aturan yang diharapkan dapat dipatuhi dan diikuti oleh anggota masyarakat pada suatu entitas sosial tertentu. Norma-norma ini biasanya mengandung sanksi sosial yang dapat mencegah individu berbuat sesuatu yang menyimpang dari kebiasaan yang berlaku di masyarakatnya.

5) Nilai-Nilai

Nilai adalah sesuatu ide yang telah turun temurun dianggap benar dan penting oleh anggota kelompok masyarakat. Misalnya, nilai harmoni, prestasi, kerja keras, kompetisi dan lainnya merupakan contoh-contoh nilai yang sangat umum dan dikenal dalam kehidupan masyarakat.

6) Tindakan yang Proaktif

Salah satu unsur penting dalam modal sosial adalah keinginan yang

kuat dari anggota kelompok untuk tidak saja berpartisipasi tetapi senantiasa mencari jalan bagi keterlibatan mereka dalam suatu kegiatan masyarakat.

Kepercayaan (*trust*), norma dan jaringan sosial (*network*) adalah konsep-konsep inti dalam modal sosial

1. Kepercayaan (*Trust*)

Rasa percaya adalah dasar dari perilaku moral dimana modal sosial dibangun. Moralitas menyediakan arahan bagi kerjasama dan koordinasi sosial dari semua aktivitas sehingga manusia dapat hidup bersama dan berinteraksi satu dengan lainnya. Rasa saling mempercayai yang tinggi akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai ragam bentuk dan dimensi terutama dalam konteks membangun kemajuan bersama. Fukuyama mendefinisikan kepercayaan (*trust*) sebagai sikap saling mempercayai di dalam masyarakat yang memungkinkan masyarakat tersebut saling bersatu dengan yang lain dan memberikan kontribusi pada peningkatan modal sosial.

Trust atau kepercayaan adalah suatu bentuk keinginan untuk mengambil resiko dalam hubungan-hubungan sosialnya yang didasari oleh perasaan yakin bahwa yang lain akan melakukan sesuatu seperti yang diharapkan dan akan senantiasa bertindak dalam suatu pola tindakan yang saling mendukung, paling tidak yang lain tidak akan bertindak merugikan diri dan kelompoknya sedangkan dalam pandangan yang dikemukakan oleh Fukuyama menyatakan bahwa trust adalah sikap saling mempercayai di masyarakat yang memungkinkan masyarakat tersebut saling bersatu dengan

yang lainnya dan memberikan kontribusi pada peningkatan modal sosial.

Dakhli dan De Clereg membedakan kepercayaan menjadi dua yaitu :

1) General Trust

Kepercayaan umum merupakan kepercayaan seseorang terhadap individu atau orang lainnya. Kepercayaan disini disebut kepercayaan asumptif; percaya karena percaya saja. Misalnya adalah ketika orang Jawa bertemu dengan sesama orang Jawa di New York karena persamaan etnis maka kedua orang ini akan saling percaya satu sama lain.

2) Institusional Trust

Kepercayaan institusional merupakan kepercayaan seseorang terhadap suatu organisasi atau institusi. Kepercayaan disini dilihat dari segi seseorang mempercayai suatu organisasi karena integritas dari organisasi tersebut.

Lawang mendefinisikan inti kepercayaan antar manusia ada tiga hal yang saling terkait yaitu :

- 1) Hubungan sosial antara dua orang atau lebih. Yang termasuk dalam hubungan ini adalah seperti sebuah institusi yang diwakili oleh orang. Seseorang percaya pada institusi tertentu untuk kepentingannya karena orang-orang dalam institusi itu bertindak.
- 2) Harapan yang terkandung dalam hubungan itu, yang kalau di realisasikan tidak akan merugikan salah satu atau kedua belah pihak.
- 3) Interaksi sosial yang memungkinkan hubungan dan harapan itu

terwujud.

2. Norma

Norma sosial akan sangat berperan dalam mengontrol bentuk-bentuk perilaku yang tumbuh dalam masyarakat. Pengertian norma itu sendiri adalah sekumpulan aturan yang diharapkan dapat dipatuhi dan diikuti oleh anggota masyarakat pada suatu entitas sosial tertentu. Di dalam perusahaan, mau tertulis maupun tidak tertulis secara tidak langsung sebuah norma pasti terbentuk. Konfigurasi norma yang tumbuh di dalam organisasi juga akan menentukan apakah norma akan memperkuat kerekatan hubungan antara individu dan memberikan dampak positif di dalam organisasi tersebut. Norma yang telah dijalankan dalam suatu organisasi biasanya mengandung sanksi sosial yang dapat mencegah individu berbuat sesuatu yang menyimpang dari kebiasaan yang berlaku di organisasi maupun di dalam masyarakat yang ada.

Norma muncul dari pertukaran yang saling menguntungkan. Artinya, kalau dalam pertukaran itu keuntungan hanya dinikmati oleh salah satu pihak saja, pertukaran sosial selanjutnya pasti tidak akan terjadi. Kalau dalam pertukaran pertama keduanya saling menguntungkan maka akan muncul pertukaran yang kedua dengan harapan akan mendapatkan keuntungan pula. Kalau prinsip ini dipegang teguh terus oleh kedua belah pihak maka dari situlah akan muncul norma dalam bentuk kewajiban sosial, yang intinya membuat kedua belah pihak merasa diuntungkan dari pertukaran itu.

Lawang menjelaskan bahwa norma tidak dapat dipisahkan dari jaringan dan kepercayaan. Menurut Lawang, norma bersifat resiprokal, artinya isi norma menyangkut hak dan kewajiban kedua belah pihak yang dapat menjamin keuntungan yang diperoleh dari suatu kegiatan tertentu. Dalam konteks ini, orang yang melanggar norma resiprokal yang berdampak pada berkurangnya keuntungan di kedua belah pihak, akan diberi sanksi negatif yang sangat keras. Plateau mendefinisikan norma sebagai aturan yang menentukan perilaku bersama dalam suatu kelompok individu juga dipahami sebagai prinsip keadilan yang mengarahkan pelaku untuk berperilaku yang tidak mementingkan diri sendiri. Putnam menjelaskan bahwa social trust dalam kondisi modern dapat di tingkatkan melalui norma resiprositas. Hasbullah mengartikan resiprositas sebagai kecenderungan saling tukar kebaikan antar individu dalam suatu kelompok atau antar kelompok itu sendiri.

3. Jaringan

Hasbullah mendefinisikan jaringan sosial sebagai hubungan hubungan yang tercipta antar suatu kelompok dengan kelompok lainnya. Hubungan-hubungan antar individu dalam suatu kelompok juga disebut suatu jaringan. Kelompok yang dimaksud dimulai dari yang terkecil yaitu; keluarga, kelompok kekerabatan, komunitas tetangga, kelompok-kelompok asosiasi, organisasi formal dan bentuk-bentuk lainnya. Hubungan-hubungan yang terjadi bisa dalam bentuk formal maupu informal.

Lawang mengartikan jaringan adalah sumber pengetahuan yang

menjadi dasar utama dalam pembentukan kepercayaan strategik. Media yang paling ampuh untuk membuka jaringan adalah pergaulan dalam pengertian umum dengan membuka diri lewat media cetak atau elektronik. Kalau dalam kehidupan sehari-hari seseorang tidak pernah bergaul maka akan sulit untuk membuka jaringan dan juga jika orang tersebut tidak mendapatkan atau mengalami masalah biasanya juga kesulitan dalam membuka jaringan. Jaringan yang dibahas dalam modal sosial, menunjuk pada semua hubungan dengan orang atau kelompok lain yang memungkinkan pengatasan masalah dapat berjalan secara efisien dan efektif.

Lin mendefinisikan bahwa jaringan terdiri dari tiga jenis jaringan yaitu :

- 1) Business Network adalah jaringan bisnis yang berupa klien, supplier dan juga pesaing yang ada disekitar.
- 2) Information Network adalah jaringan informasi yang berupa event pameran, meeting, rapat dan sebagainya.
- 3) Research Network adalah jaringan penelitian yang berupa penelitian di laboratorium dan organisasi untuk transfer teknologi

Granovetter membedakan modal sosial berdasarkan kekuatan dari sebuah ikatan sosial yaitu :

a. Strong Ties

Ikatan yang kuat merupakan ikatan yang mengikat dan bersifat terus menerus pada setiap kelompok. Ikatan yang kuat ini dapat

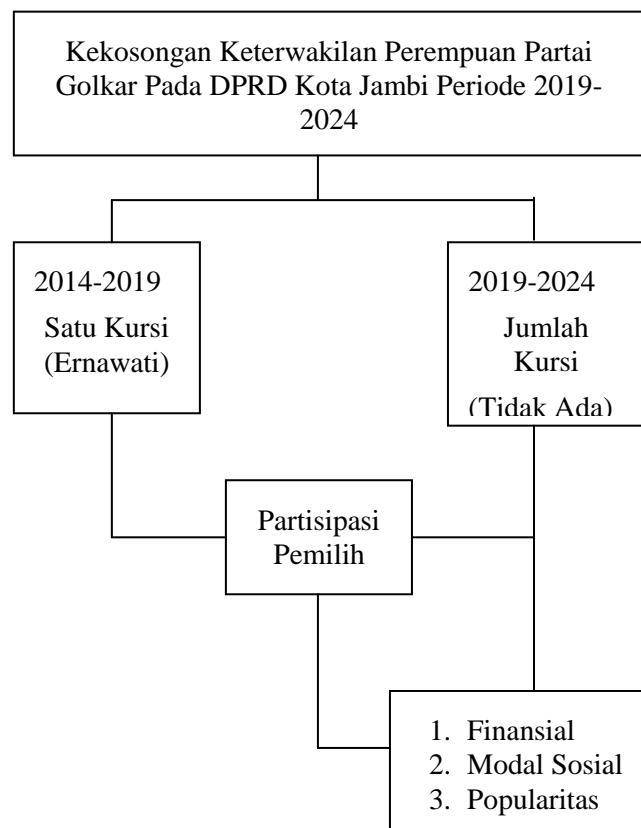
dikatakan seperti ikatan yang ada di dalam sebuah kelompok teman dekat. Ikatan yang kuat memberikan motivasi yang lebih besar kepada seseorang untuk saling memberi bantuan karena ikatan tersebut membuat solidaritas antar sesama semakin besar. Semakin kuat ikatan antara dua orang maka semakin besar tingkat tumpang tindih dalam lingkaran kelompok sosial mereka

b. Weak Ties

Ikatan yang lemah merupakan ikatan yang tidak mengikat dan bersifat sementara. Ikatan yang lemah ini terjadi di antara kelompok yang berbeda seperti hubungan dengan teman-teman dari lingkungan sosial yang berbeda. Hal ini bisa disebabkan karena perbedaan etnis atau perbedaan ras. Ikatan yang lemah dapat menjadi jembatan sosial karena ikatan ini dapat menjadi penghubung ke lingkaran sosial yang berbeda-beda dimana dapat menyeberangi batas-batas kelompok sosial.

1.6 Kerangka Pemikiran

Berikut adalah bagan kerangka berfikir dari penelitian Analisis Kekosongan Keterwakilan Perempuan Partai Golkar Pada DPRD Kota Jambi Periode 2019-2024.



1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian umumnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan penelitian. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu

dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis²⁰.

1.7.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif. Dalam penelitian kualitatif ini, metode penelitian yang dilakukan adalah dengan mengumpulkan data-data yang berasal dari berbagai literatur, dokumentasi atau wawancara yang dilakukan kepada sumber utama terkait dengan cara menganalisis antara konsep, kebijakan dan hasil yang ditemukan di lapangan saat dilakukannya penelitian. Pendekatan kualitatif menekankan pada makna, penalaran, definisi suatu situasi tertentu, pendekatan kualitatif, lebih mementingkan proses dibandingkan dengan hasil akhir. Oleh karena itu urutan kegiatan dapat berubah-ubah tergantung pada kondisi dan banyaknya gejala-gejala yang ditemukan²¹.

1.7.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan terhadap DPD II partai Golkar Kota Jambi. Pertimbangan penulis meneliti lokasi ini guna memperoleh keterangan-keterangan informasi dan data yang diperlukan dalam penelitian yang sedang diteliti oleh peneliti.

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Alfabeta (Bandung: Alfabeta, 2010).

²¹ Djamin Satori and Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Alfabeta, 2017), hlm 39

1.7.3 Fokus dan Dimensi Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan, maka fokus penelitian ini adalah menganalisis apa yang menjadi penyebab tidak satupun dari 16 caleg perempuan Partai Golkar terpilih sebagai anggota DPRD Kota Jambi Pada Pileg 2019. Maka Dimensi dari penelitian ini meliputi faktor-faktor penyebab yang bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi hal yang melatarbelakangi terjadinya kekosongan keterwakilan perempuan partai Golkar pada DPRD Kota Jambi 2019- 2024.

1.7.4 Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis sumber data yaitu data primer dan sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber asli atau sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data²². Data primer adalah data pokok yang diperlukan dalam penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumbernya ataupun dari lokasi objek penelitian atau keseluruhan data hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui sumber perantara dan diperoleh dengan cara mengutip dari sumber lain berupa literatur-literatur berupa buku-buku, skripsi, jurnal dan data pendukung yang diperoleh peneliti dari sumber informasi kemudian dikumpulkan selama proses penelitian.

²² Sugiyono, Op.Cit. hlm 225

1.7.5 Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, Purposive sampling adalah menentukan subjek/objek sesuai tujuan dengan menggunakan pertimbangan pribadi yang sesuai dengan topik penelitian. Peneliti memilih subjek/objek sebagai unit analisis, Peneliti memilih unit analisis tersebut berdasarkan kebutuhannya dan menganggap bahwa unit analisis tersebut representatif²³.

Adapun kriteria informan yang dibutuhkan peneliti adalah orang yang terlibat langsung dalam pileg 2019. Berikut ini informan yang dibutuhkan oleh peneliti :

Tabel 3. Informan Penelitian

No.	Informan	Keterangan	Alasan
1.	Budi Setiawan	Ketua DPD II Partai Golkar Kota Jambi	Mengetahui proses pileg 2019 Partai Golkar
2.	Bambang Gunawan	Wakil Ketua DPD Golkar	Wakil Ketua DPD Golkar
3.	Hazairin	Komisioner KPU Kota Jambi	Komisioner KPU Kota Jambi
4.	Saiful	Ketua fraksi Golkar DPRD Kota Jambi	Ketua fraksi Golkar DPRD Kota Jambi

²³ *Ibid*, hlm. 48.

5.	Meivianur Sangda, S.Pd	Caleg Perempuan Partai Golkar Dapil III	Mengetahui proses pileg 2019
6.	Yuliantie, SE	Caleg Perempuan Partai Golkar Dapil V	Mengetahui proses pileg 2019

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan berbagai teknik, namun dalam penelitian ini teknik yang digunakan adalah:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri-ciri yang spesifik dibandingkan dengan teknik yang lain, atau pengamatan dan pencatatan dengan sistematisa fenomena-fenomena yang akan diselidiki. Observasi merupakan kegiatan yang berhubungan dengan pengawasan, peninjauan, dan penyelidikan riset. Observasi atau pengamatan merupakan aktivitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis²⁴.

2. Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*)

Wawancara mendalam (*In-depth Interview*) adalah proses memperoleh keterangan Metodologi Penelitian Kualitatif: Dasar teori dan Terapannya dalam Penelitian untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.

²⁴ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial : Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif* (Edisi Kedua) (Jakarta: Erlangga, 2009) hlm. 86

Dalam penelitian ini, peneliti hanya menggunakan pengambilan sampel yang tertarik sebagai informasi kunci²⁵.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, Dokumen bisa berbentuk tulisan gambar, atau karya- karya monumental dari seseorang. Dalam penelitian ini dokumentasi yang digunakan berupa foto lapangan dalam kegiatan pengumpulan informasi atau data.

1.7.7 Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis ini digunakan untuk menilai objek penelitian berdasarkan sifat tertentu dimana dalam penilaian sifat dinyatakan tidak dalam angka-angka dan digunakan untuk menjelaskan analisis data yang diperoleh kemudian diolah dengan cara :

1. Reduksi Data

Proses dimana seorang peneliti melakukan pendataan awal terhadap data-data yang telah dihasilkan, dengan cara melakukan pengujian data dalam kaitannya dengan aspek atau fokus penelitian.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah penyusunan data dengan sistematis sesuatu dengan yang telah direncanakan. Penyajian bertujuan untuk memudahkan dalam membaca dan menarik kesimpulan

3. Penarikan Kesimpulan

²⁵ Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Dasar Teori Dan Terapannya Dalam Penelitian*, Edisi Kedua. (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2006), hlm. 70

Menarik kesimpulan atau verifikasi merupakan interpretasi secukupnya terhadap data yang telah disusun untuk menjawab rumusan masalah sebagian hasil dari kesimpulan.

1.7.8 Keabsahan Data

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari beberapa teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas dengan berbagai teknik pengumpulan data dengan berbagai sumber data.